

### BAB III

#### LANDASAN TEORI

##### A. Hibah dalam Islam

###### 1. Pengertian

Hibah mungkin suatu yang asing dan jarang di dengar masyarakat Islam di negara ini berbanding zakat, sedekah, hadiah, wakaf atau wasiat. Namun, hibah bukanlah instrumen kewangan yang baru kerana sudah ada sejak awal Islam lagi.

Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewati atau menyalurkan, juga bisa diartikan memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad *tabarru*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*nonprofit*), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah ialah:

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الأحياء تطوعاً

*“akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”*

Hibah ialah suatu akad mengandungi pemberian milik seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan (iwad). Hibah diberi atas dasar kasih sayang

---

<sup>1</sup> . Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*( Konsep, Regulasi, Dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjaja Mada University Press, 2010) hal. 174.

sesama manusia. Dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Hal inilah yang membedakan dengan wasiat.<sup>2</sup>

## 2. Dasar Hukum

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunat) dalam Islam. Dan Ayat ayat Al quran maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul – betul membutuhkannya, dalam firman Allah:



... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa..( QS: Al Maidah: 2).<sup>3</sup>

Dalam Islam adanya hibah sangat dianjurkan mengingat ia bersifat tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesama.

Ulama hanafiah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. Dengan demikian dapat dibatalkan oleh pemberi.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>. *Ibid.*

<sup>3</sup>. Departemen AgamaRI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asyifa', 2001) hlm. 280.

<sup>4</sup>. Rahmat Safi'i, *Fiqih Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia2010) Hlm. 30.

### 3. Rukun dan Syarat Hibah

Adanya hibah harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, agar hibah yang dilaksanakan benar-benar sah dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Adapun yang menjadi rukun hibah adalah:

a. Wahib (Pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain. sebagai pemberi hibah, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ia harus menjadi pemilik sah dari barang yang dihibahkan.
- 2) Dewasa (*baligh*).
- 3) Tidak ada halangan dalam melakukan perbuatan hukum.
- 4) Tidak ada paksaan dan kekhilafan sehingga tidak ada cacat kehendak.<sup>5</sup>

b. Mauhub lah (Penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima hibah.

c. Mauhub

Mauhub adalah barang yang di hibahkan. Benda yang dihibahkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Ada barangnya.
- 2) Benda harus mempunyai nilai.
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya.

---

<sup>5</sup> . Anshori Abdul Ghofur. *Op.cit.* hal. 176

4) Bendanya harus dapat diserahkan.

Benda yang dihibahkan tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada turunannya dengan syarat benda yang telah dihibahkan tetap dalam kekuasaan pihak yang diberi hibah.<sup>6</sup>

d. Shighat (Ijab dan Qabul)

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul.

## **B. Kemiskinan**

### **1. Pengertian Kemiskinan**

Secara umum kemiskinan lazim didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Para ahli ekonomi mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Oscar Lewis, seorang antropologi Amerika memaknai kemiskinan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primernya, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan.<sup>7</sup>

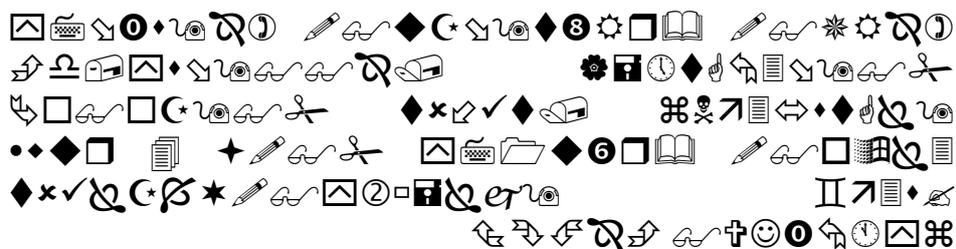
Ekonomi Islam juga membahas masalah kemiskinan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Sudah menjadi kewajiban umat Islam yang mampu membantu umat Islam yang tidak mampu.

---

<sup>6</sup> . Hamid Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005) Cet 2 Hal. 71.

<sup>7</sup> . M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Ekonomi Makro “ Konsep, Teori, Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 229.

Dalam prinsip Islam menentang persepsi bahwa kemiskinan adalah sarana penyucian jiwa yang harus dipelihara dan dipertahankan, Islam juga menolak asumsi bahwa kemiskinan adalah kondisi yang harus diterima apa adanya, karena ia merupakan takdir tuhan yang merupakan harga mati. Artinya kemiskinan harus doretaskan karena sesungguhnya kemiskinan banyak membuat kemelaratan. Jadi, Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 105:



Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat ( Q.S AL-Nisa 105).<sup>8</sup>

Dari ayat tersebut maka dijelaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh jaminan serta hidup yang layak, sesuai dengan harkat martabat manusia yang sesuai dengan ajaran- ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah Allah di atas permukaan bumi.

#### a. Ciri-ciri Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi,

<sup>8</sup> . Departemen AgamaRI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asyifa', 2001)

keterbelakangan, serta keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya akses kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Kemiskinan juga menghambat demokrasi, keadilan dan persatuan. Oleh karena itu, pengetasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.<sup>9</sup> Karena itu langkah-langkah yang diambil adalah penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin, pengembangan budaya usaha masyarakat miskin, serta pengembangan keswadayaan masyarakat miskin.<sup>10</sup>

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (*poverty line*). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut.<sup>11</sup>

Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan didalam pendapatan, biasaya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Di negara-negara maju, kemiskinan relatif diukur sebagai suatu proporsi dari tingkat pendapatan rata-rata perkapita. Sebagai suatu ukuran relatif,

---

<sup>9</sup> . Adisasmita Raharjo, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) Hal. 191-192.

<sup>10</sup> . Sadono Sukiro, *Makro Ekonomi Moderen*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 17.

<sup>11</sup> .Tambunan Tulus T.H, *Perekonomian Indonesia” Teori Dan Temuan Empiris*,(jakarta: ghalia indonesia,2011), hal. 71.

kemiskinan relatif dapat berbeda menurut negara atau periode di dalam suatu negara.<sup>12</sup>

Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di bawah, dimana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi, ini adalah ukuran tetap (tidak berubah) dalam bentuk suatu kebutuhan kalori minimum ditambah komponen-komponen nonmakanan yang juga sangat diperlukan untuk *survive*. Walaupun kemiskinan absolut sering juga disebut kemiskinan ekstrem, tetapi maksud dari yang terakhir ini bisa bervariasi, tergantung pada interpretasi setempat atau kalkulasi.<sup>13</sup>

Pengukuran kemiskinan di Indonesia mengacu pada standar WHO. Dimana seseorang dikatakan miskin jika hanya memenuhi kebutuhan kalori minimal 2.100 kalori perhari plus kebutuhan pokok lain di luar makan, kebutuhan pokok selain makanan meliputi perumahan (penerangan, bahan bakar, dan air bersih), pakaian, beberapa barang-barang yang tahan lama, dan berbagai jasa yang jika dirupiahkan nilainya berubah dari tahun ke tahun.<sup>14</sup>

Islam membagi miskin menjadi 3 kategori yaitu:

- 1) Miskin iman, yaitu orang yang tidak ada hubungan dengan Allah.
- 2) Miskin ilmu, orang yang tidak tahu cara menyelesaikan masalah hidupnya sehingga terus berada dalam kemiskinan.

---

<sup>12</sup> . *ibid.* Hal. 71

<sup>13</sup> . *ibid.* Hal. 72.

<sup>14</sup> . Muhammad Arsjad, Dkk. *Sumber Daya, Teknologi Dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Utama, 1995), hal. 149.

- 3) Miskin harta, orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup.<sup>15</sup>

#### **b. Langkah-langkah Mengatasi Kemiskinan**

Pengetasan kemiskinan dapat dikelompokkan dalam beberapa upaya seperti:

- 1) Meningkatkan kepemilikan (*ownership*) atas aset fisik seperti tanah, bangunan rumah dan alat produksi lainnya melalui bantuan kredit dengan bunga rendah.
- 2) Meningkatkan pendapatan penduduk miskin melalui lapangan kerja yang lebih baik.
- 3) Memperbaiki akses penduduk miskin kepada infrastruktur seperti jalan, publik transport, fasilitas pasar, bank dan lainnya.
- 4) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
- 5) Memperbaiki kondisi lingkungan kehidupannya melalui penyediaan perumahan yang layak huni.
- 6) Memberi bantuan khusus kepada daerah yang terkena bencana alam.<sup>16</sup>

Program-program dari pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin. 2. Pengembangan sistem jaminan sosial. 3. Pengembangan budaya usaha masyarakat, tujuannya

---

<sup>15</sup> . M. Nur Rianto Al Arif, *Op. Cit* hal. 231-232

<sup>16</sup> . Adisasmita Raharjo. *Op.Cit.* hal. 196-197.

agar usaha lebih maju, mengembangkan jiwa wirausaha, dan meningkatkan keterampilan keluarga miskin untuk melakukan usaha ekonomi produktif. 4. Mengembangkan keswadayaan masyarakat miskin, tujuannya agar masyarakat siap memecahkan masalah kemiskinan dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.<sup>17</sup>

## **2. Pendapatan**

### **a. Pengertian Pendapatan**

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan atau penghasilan. Pendapatan setiap individu biasanya ada perbedaan antara individu yang lainnya, ini disebabkan oleh perbedaan keahlian dibidang masing-masing. Pendapatan ialah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu( biasanya dalam satu tahun).

### **b. Penyebab Pendapatan Masyarakat Tidak Merata**

Ada beragam sumber pendapatan keluarga, ini dikarenakan anggota keluarga yang bekerja melakukan kegiatan usaha yang berbeda satu sama lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi keragaman pendapatan keluarga adalah penguasaan faktor produksi. Pendapatan itu sendiri diperoleh sebagai hasil bekerja. Kumpulan pendapatan tersebut merupakan modal total rumah tangga.

---

<sup>17</sup> . Adisasmita Raharjo. *Loc. Cit.*

Pendapatan dari seluruh anggota keluarga disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pendapatan seseorang dapat berubah ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kemampuan mereka, dengan berubahnya pendapatan seseorang maka akan merubah pola hidup dalam mengkonsumsi suatu barang. Itulah mengapa tingkat pendapatan keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Oleh karenanya Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spritual dalam memelihara keadilan setiap aktivitas ekonomi. Inilah mengapa dalam ekonomi Islam tidak ada kepemilikan mutlak, karena sesungguhnya sang pemilik mutlak itu hanyalah Allah SWT.

Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 189:



Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah

Maha perkasa atas segala sesuatu.”(Q.S 3: 189)<sup>18</sup>

Jadi didalam ekonomi Islam tidak mengenal yang namanya kepemilikan mutlak, di dalam ajaran agama Islam setiap harta milik seseorang terdapat sebagian hak orang lain didalamnya(fakir miskin)

<sup>18</sup> . Departemen Agama RI. *Op.cit*, hal. 59

cara mendistribusikan harta kita kepada fakir miskin adalah dengan cara zakat, infak, sedekah. Guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

**3. Kesejahteraan**

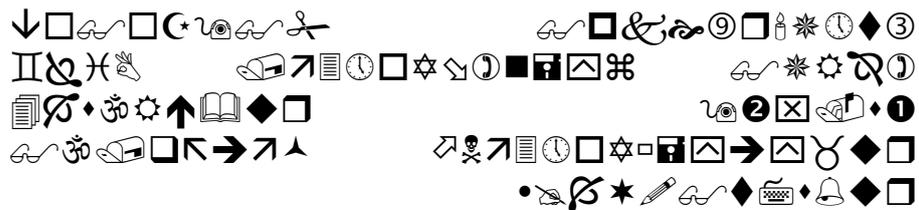
**a. Pengertian Kesejahteraan**

Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, dan berbagai macam kesejahteraan akan jauh lebih terasa jika di masyarakat ada kecukupan akan barang, jasa, dan kesempatan, oleh karena itu, kesejahteraan secara adil hanya ada jika dapat disajikan barang dan jasa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesejahteraan memerlukan keberhasilan dalam mengelola ekonomi dan diikuti dengan pemerataan yang adil.

Pengertian dari sejahtera dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah aman sentosa dan makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah kondisi dimana seorang manusia merasa hidupnya sejahtera.<sup>19</sup>

**b. Pentingnya Pemerataan Kesejahteraan**

Prinsip-prinsip Islam mengajarkan kita pentingnya pemerataan kesejahteraan manusia. Pertama, manusia harus saling mengenal dan tolong menolong, Allah berfirman didalam surat Al-Hujarat ayat 13:

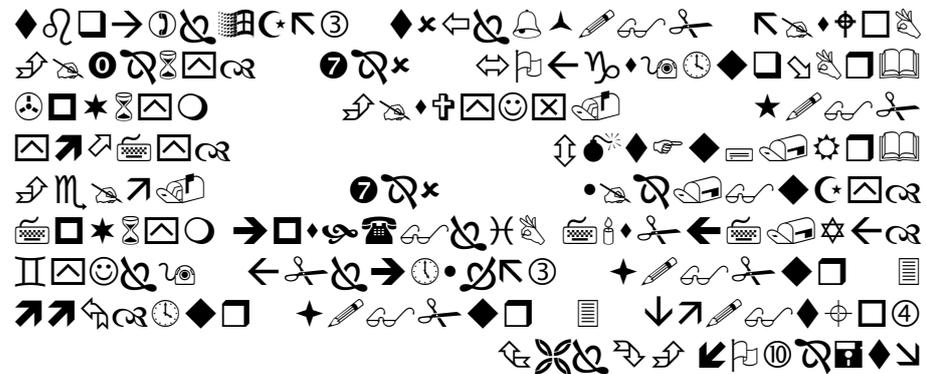


<sup>19</sup> . Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hal. 270.



Artinya: “hai manusia sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu dihadapan Allah ialah orang yang bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal”.(Q.S Al-Hujarat: 13)<sup>20</sup>

Kedua, sesama mukmin itu adalah bersaudara, agar kita dapat merasakan penderitaan saudara kita. Ketiga, seluruh umat Islam diwajibkan memperhatikan dan membantu orang miskin dan orang yang dalam kesulitan atau kesusahan. Keempat, umat Islam harus selalu beramal dan bersedekah. Sebagaimana firman Allah didalam surat Al-Baqarah ayat 261:



Artinya: “perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka dijalan Allah Adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh butir dan tiap butir tumbuh seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi orang yang dikehendaknya. Dan Allah maha luas (karunianya) dan Allah maha mengetahui”.(Q.S Al-Baqarah : 261)<sup>21</sup>

<sup>20</sup> . Departemen Agama RI. *Op.Cit* hal. 412.

<sup>21</sup> . Departemen Agama RI. *Op.Cit* hal. 483.

Jadi jelaslah bagaimana Islam memberikan jaminan kepada manusia untuk hidup secara layak. Cukup kebutuhan sandang, pangan, serta papan. Agar terwujudnya kesejahteraan hidup.

#### **4. Ekonomi Kerakyatan**

##### **a. Pengertian Ekonomi Kerakyatan**

Konsep ekonomi kerakyatan sudah lama ada, akan tetapi sering kali dilupakan orang dan banyak yang tidak memahami secara tepat apa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan dan sistem ekonomi kerakyatan tersebut. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia ekonomi kerakyatan dibagi menjadi dua frasa yaitu 'ekonomi' asas aktifitas produksi, distribusi, dan konsumsi, sedangkan 'kerakyatan' mengacu segala sesuatu yang mengenai rakyat. Jadi, Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>22</sup>

Konsep ekonomi rakyat sebenarnya adalah bagian besar dari cara-cara rakyat beraktifitas dan bertahan untuk menjaga kelangsungan kehidupannya, baik itu di perdagangan atau kegiatan swadaya lainnya baik dipertanian maupun dipedesaan. Ciri-ciri ekonomi kerakyatan yaitu tradisional dengan memodalkan tenaga kerja dan modal seadanya.

---

<sup>22</sup>. Departemen Pendidikan Nasional. *Op.Cit.* Hal. 287.

Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan di negara-negara kawasan Eropa ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda.

Salah satu harapan adalah agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling bawah. Namun demikian dalam kenyataannya, banyak rakyat dilapisan bawah tidak selalu dapat menikmati cucuran hasil pembangunan yang diharapkan itu. Bahkan, dibanyak negara-negara berkembang, kesenjangan sosial makin melebar dan sangat terasa.

Dalam konsep ekonomi kerakyatan, pembangunan berorientasi kepada rakyat dan berbagai kebijaksanaan berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas tersebut jelas sekali bahwa konsep ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain, konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat.<sup>23</sup>

Berdasarkan bunyi kalimat pertama penjelasan pasal 33 UUD 1945, dapat dirumuskan perihal substansi ekonomi kerakyatan dalam garis besar mencakup tiga hal: pertama, partisipasi seluruh anggota

---

<sup>23</sup> . Limbong Bernhad, *Ekonomi Kerakyatan Dan Nasionalisme Ekonomi*,( Jakarta: Marghareta Pustaka, 2013) Hal. 80.

masyarakat dalam pembentukan produksi nasional, sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional. Kedua, partisipasi seluruh anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional, jaminan agar seluruh masyarakat dapat menikmati hasil produksi nasional termasuk fakir miskin dan anak terlantar. Ketiga, kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu berlangsung dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, agar anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan ekonomi. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek kegiatan ekonomi.<sup>24</sup>

**b. Ekonomi Kerakyatan dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin**

Kegiatan ekonomi dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kemakmuran rakyat, inilah falsafah dalam ekonomi kerakyatan. Didalam ekonomi kerakyatan harus mampu memberikan akses yang *fair* dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh input, melakukan proses produksi, distribusi, dan memanfaatkan konsumsi tanpa ada hambatan untuk masuk pasar dengan mengorbankan fungsi sumber daya alam sebagai alat pendukung sistem kehidupan bermasyarakat. Jadi, kerakyatan sebagai prinsip kenegaraan berarti bahwa kepentingan atau kemaslahatan rakyatlah yang harus menjadi sumber dan rujukan semua kebijakan dan langkah kekuasaan negara,

---

<sup>24</sup> . *Ibid.* Hal. 81.

bukan terutama kepentingan pengusanya atau sikuat yang ada diatas.

Dalam kaidah fikih dikatakan:

“Kebijakan pemimpin (pemerintah) atas rakyat haruslah selalu mengacu pada kepentingan mereka” ( Abdurrahman as-Sayuthi, al-Asybah wa An-Nadhair, vol. 1, hal, 121)<sup>25</sup>

Kemudian didalam memberdayakan masyarakat haruslah berawal dari memberdayakan setiap rumah tangga yang mencakupi: Pertama, pemberdayaan sosial ekonomi. Kedua, pemberdayaan politik. Ketiga, pemberdayaan psikologis. Mengingat jumlah rakyat yang begitu banyak, bisa puluhan bahkan ratusan juta, maka untuk mengetahui dan memastikan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat oleh rakyat mutlak diperlukan mekanisme sekaligus lembaga politik yang disebut lembaga permusyawaratan(MPR)/perwakilan (DPR) yang secara sungguh-sungguh mewakili dan menyuarakan aspirasi rakyat.<sup>26</sup>

Dalam memberdayakan masyarakat strategi pembangunan yang dipakai ialah berpusat pada kepentingan rakyat dan kebutuhan rakyat yang arahnya pada kemandirian masyarakat ,dan berlandaskan kepada nilai-nilai demokrasi yaitu menjadikan manusia subjek pembangunan. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:

---

<sup>25</sup> Mas'udi Masdar Farid, *Syarah UUD 1945 Prespektif Islam* (Ciputat, PT Pustaka Alvabet: 2013) hal. 48.

<sup>26</sup> . *ibid.*

Pertama, tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. Dimaksudkan agar, peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dalam segala bentuk.

Kedua, terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dimaksudkan agar, penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme dan persaingan yang berkeadilan (*fair competition*).

Ketiga, terdistribusinya kepemilikan modal material secara relatif merata diantara anggota masyarakat. Dimaksudkan agar, peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada kepala pemerintah daerah.

Keempat, terselenggaranya pendidikan nasional secara Cuma-Cuma bagi setiap anggota masyarakat. Dimaksudkan agar, penguasaan dan redistribusi kepemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap

Kelima, terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi. Dimaksudkan agar, Pembaruan undang-undang koperasi dan pendirian koperasi dalam berbagai usaha kegiatan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> . Limbong Bernhad. *Op. Cit.* Hal. 88.

Ekonomi rakyat sendiri adalah berbagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (*popular*) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebutkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), terutama yang meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kerajinan, makanan, dan sebagainya, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kekurangannya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

### **c. Pengembangan Ekonomi Melalui Peternakan**

Subsektor peternakan adalah salah satu wujud nyata menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sentra-sentra peternakan kerakyatan terpadu, yakni mulai dari penyediaan bibit, pakan, dan kemudahan pemasaran pada jenis-jenis ternak yang biasa dibudidayakan petani di pedesaan. Seperti saat ini permintaan terhadap daging sapi meningkat dengan tajam, seiring banyaknya orang yang mengonsumsi daging sapi. Hal ini berdampak pada permintaan pasar yang meningkat, tetapi ketersediaan barang tidak berbanding lurus dengan banyaknya permintaan akan daging sapi.

Badan Pusat Statistik (PBS) memproyeksikan kebutuhan daging sapi masyarakat Indonesia mencapai 639.000 ton di tahun 2015. Angka ini naik sekitar 8% dari kebutuhan tahun 2014 sebesar 590.000 ton,

sedangkan di tahun 2013 hanya 529.000 ton.<sup>28</sup> Namun permintaan yang terus meningkat tidak seluruhnya dipasok dari sapi lokal karena keterbatasan populasi hidup di dalam negeri. Sebagian daging sapi harus dipenuhi dari impor terutama Australia.

Sudah waktunya didorong oleh para pemegang kebijakan melalui upaya-upaya pengembangan terpadu terhadap sentra-sentra peternakan agar kebutuhan pasar terhadap daging sapi dapat dipenuhi, juga diharapkan pelaku usaha budidaya ternak nantinya termotivasi, cepat berkembang, dan mampu meningkatkan taraf perekonomian keluarga.

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerepan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan dibidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar, seperti sapi, kerbau, dan kuda, sedangkan kelompok kedua, yaitu peternakan hewan kecil, seperti ayam, kelinci dan lain-lain.<sup>29</sup>

Ada empat kata kunci dalam mengembangkan usaha agribisnis, yaitu:

- 1) Berdaya saing
- 2) Berkerakyatan.
- 3) Berkelanjutan.

---

<sup>28</sup> . Badan Pusat Statistik (PBS)

<sup>29</sup> . *ibid.* Hal. 122

4) Terdesentralisasi (spesifik lokasi).<sup>30</sup>

Prilaku peternak di Indonesia umumnya masih berbasis investasi dan tidak fokus pada tujuan bisnis. Akibatnya, mereka tidak memprediksi kebutuhan masyarakat pada daging. Pemerintah seharusnya mengajari peternak dan mengubah dan mengubah prilaku peternak menjadi mengerti bisnis. Prilaku itu dapat di ubah diantaranya lewat pembentukan bisnis yang bersifat kolektif. Peternak di Indonesia 98 persen dikuasai peternak berskala rumah tangga dengan jumlah kepemilikan ternak sebagai dua hingga tiga sapi.<sup>31</sup> Secara relatif, usaha ternak tradisional kurang mendapatkan guncangan dalam krisis ekonomi.<sup>32</sup>

Tahun 2014 pemerintah Indonesia telah mencanangkan program Indonesia swasembada daging. Untuk menyukseskan program itu, kebijakan swasembada harus di ubah, yakni dengan adanya kebijakan tarif dan kuota impor, subsidi produksi dan perbaiki teknologi, karena kalau terus mengimpor daging dari luar maka beberapa tahun kedepan peternak Indonesia akan hancur.

Tujuan pembangunan peternakan adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, pelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan devisa negara. Jadi, pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan nasional.

---

<sup>30</sup> .Pasaribu Ali Musa, *Kewirausahaan Berbasis Agribisnis*,(Yogyakarta, Cv. Andi Offset:2012) Hal. 7

<sup>31</sup> . Limbong Bernhad. *Op. Cit.* Hal. 122.

<sup>32</sup> . Prawirokusumo Soeharto, *Ekonomi Rakyat (Konsep,Kebijakan,Dan Strategi)*, (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta: 2001) hal.24.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga sasaran utama program penanggulangan kemiskinan, yakni menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009, terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau, dan terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu.<sup>33</sup> Karna itulah peternakan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanggulangan kemiskinan.

Indonesia telah memasuki pasar global ataupun pasar bebas yang merupakan salah satu ancaman sekaligus peluang bagi peternak di Indonesia. Ancamanya, jika Indonesia terus menjadi negara yang mengimpor daging dari luar dan teknologi peternakan untuk menggerakkan proses produksi dalam negeri dan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi, maka ketergantungan terhadap barang impor akan sulit dipecahkan. Dan peluangnya, Indonesia adalah negara produsen yang aman karena produk ternak yang masih murni dan bebas dari penyakit, jadi permintaan dari luar akan lebih besar.

Adapun penghambat tumbuhnya sektor peternakan, antara lain:

- 1) Struktur industri peternakan sebagian besar tetap bertahan dalam bentuk usaha rakyat.
- 2) Ketersediaan bibit bermutu yang masih kurang.
- 3) Masalah agroindustri peternakan yang belum mampu menggerakkan sektor peternakan.

---

<sup>33</sup> . . Limbong Bernhad. *Op. Cit.* Hal. 123

- 4) Derasnya impor illegal produk-produk peternakan.
- 5) Bencana penyakit.

Maret 2005, masyarakat peternakan di Indonesia kembali memperoleh cobaan bencana ketika gelombang wabah flu burung (*Avian Influenza*)<sup>34</sup>

- 6) Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku pakan.<sup>35</sup>

Peternakan merupakan sektor yang memiliki peluang sangat besar untuk dikembangkan sebagai usaha di masa depan. kebutuhan masyarakat akan produk pertanian meningkat setiap tahunnya, sebabnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi guna meningkatkan kualitas hidup. Peternakan merupakan penyedia protein, energi, vitamin, dan mineral.

Peternakan Indonesia dapat di cermati melalui empat aspek yaitu:

- 1) Aspek sumber daya manusia

Masyarakat desa yang identik akan dunia peternakan mulai meninggalkan kebiasaan mereka tersebut. Banyak generasi muda yang memilih berurbanisasi ke perkotaan, maka peternakan didesa akan mulai hilang.

- 2) Aspek sumber daya alam

---

<sup>34</sup> . Arifin Bustanul, *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan Dan Pertanian* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2007) Hal. 173.

<sup>35</sup> . Limbong Bernhad. *Op. Cit.* Hal. 124-125

Sumber daya alam Indonesia sangatlah kaya dan berpotensi untuk kelangsungan peternakan, namun, bencana yang terus melanda Indonesia yang mempengaruhi kondisi peternakan.

3) Aspek sumber daya modal

Sangat sedikit pemodal yang bersedia berinvestasi di dunia peternakan, karena iklim peternakan mulai melesu.

4) Aspek kebijakan

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini tidak berpihak pada peternakan rakyat. Kebijakan impor yang mengalir deras membuat peternakan rakyat tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri yang lebih murah.